

RENCANA AKSI KINERJA

Tahun 2025



**Direktorat Jenderal
Perumahan Perkotaan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan Rencana Aksi Kinerja (Renaksi) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. Rencana Aksi Kinerja ini di susun sebagai salah satu wujud penyelenggaraan pembangunan, pelayanan, dan pengelolaan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang akuntabel dan transparan di bidang penyelenggaraan perumahan.

Dokumen ini disusun sebagai bentuk penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Rencana Aksi Kinerja ini merupakan acuan pelaksanaan program dan kegiatan prioritas di bidang perumahan dan kawasan perkotaan, yang berfokus pada pencapaian target pembangunan berkelanjutan, penyediaan hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Penyusunan Rencana Aksi Kinerja ini juga mengacu pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan, serta mendukung agenda nasional seperti Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan program prioritas nasional lainnya.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, baik dari internal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan maupun pemangku kepentingan terkait lainnya. Kami berharap dokumen ini dapat menjadi pedoman pelaksanaan yang efektif, serta mendorong sinergi antarunit dan mitra kerja dalam rangka mewujudkan perumahan dan kawasan perkotaan yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan.

Akhir kata, semoga dokumen Rencana Aksi Kinerja ini dapat memberikan manfaat dan menjadi landasan yang kuat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan secara optimal.

Jakarta, 26 Agustus 2025

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN


SRI HARYATI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR GAMBAR	IV
DAFTAR TABEL	III
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	2
1.2.1 Tugas	2
1.2.2 Fungsi	2
1.2.3 Struktur Organisasi	3
1.3 Aspek Strategis (Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan)	8
1.3.1 Tujuan	8
1.3.2 Asta Cita Sektor Perumahan	8
1.3.3 Sasaran Program dan Kegiatan	10
1.4 Isu Strategis	11
BAB II PENETAPAN KINERJA.....	17
2.1 Target Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025–2029 17	
2.2 Target Output Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025...	28
2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025	29
2.4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025	37
2.5 Target Kinerja Triwulan	38
BAB III PENUTUP.....	43
LAMPIRAN.....	47
LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN.....	47
LAMPIRAN II. SURAT PENGESAHAN DIPA.....	70
LAMPIRAN III. LEMBAR PERJANJIAN KINERJA	75

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.....	3
Gambar 1. 2 Asta Cita dan Visi Misi RPJMN 2025 – 2029.....	9
Gambar 1. 4 Persebaran <i>Backlog</i> Kualitas di Indonesia per Juni 2025	12
Gambar 2. 1 Lembar Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	30

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PKP 2025-2029	17
Tabel 2. 2 Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025 – 2029	18
Tabel 2. 3 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025 – 2029	20
Tabel 2. 4 Target <i>Output</i> Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025.	28
Tabel 2. 5 Metode Perhitungan Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	31
Tabel 2. 6 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025	37
Tabel 2. 7 Target Rencana Aksi Kinerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA 2025	39
Tabel 2. 8 Target Kinerja Triwulan Berdasarkan KRO/RO	41

BAB 1

Pendahuluan



*RENCANA
AKSI
TA 2025*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) bahwa: setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan; mengamanatkan bahwa setiap Warga Negara Indonesia memiliki hak dasar atas perumahan dan permukiman. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 40 bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak. Pemenuhan hak dasar Warga Negara Indonesia atas tempat tinggal yang layak diwujudkan melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu. Salah satu tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 adalah mendukung penataan dan pengembangan wilayah serta penyebaran penduduk secara merata melalui pertumbuhan lingkungan hunian dan kawasan permukiman sesuai dengan tata ruang untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Sejalan dengan amanat undang-undang di atas, salah satu arah kebijakan sarana dan prasarana untuk mendukung transformasi ekonomi yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 – 2045 yaitu pengembangan sektor perumahan yang mendukung kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tersebut bertujuan untuk meningkatkan rasio pembiayaan perumahan terhadap PDB dan mendorong pertumbuhan perekonomian. Selain itu, RPJPN juga memberikan arahan bahwa penyediaan perumahan diarahkan untuk memastikan seluruh rumah tangga menempati rumah yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan.

Sebagai bentuk turunan dari RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029 juga memuat arahan mengenai penyediaan hunian berkualitas. Arahan tersebut termuat dalam Program Prioritas No. 13 yaitu

“Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/ perkotaan dan rakyat yang membutuhkan”, serta tercantum dalam Program Hasil Terbaik Cepat No. 7 yaitu “Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Desa dan Kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Menjamin Penyediaan Rumah Murah Bersanitasi Baik untuk Membutuhkan, Terutama Generasi Milenial, Generasi Z, dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)”. Di samping itu, Proyek Strategis Nasional No. 75 dalam RPJMN juga memuat proyek Pembangunan 3 Juta Rumah Nasional dengan koordinator Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Sejalan dengan rencana pembangunan nasional di atas, arah kebijakan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman antara lain:

- a. Penguatan layanan peningkatan akses perumahan yang layak dan terjangkau.
- b. Penguatan layanan penanganan kumuh yang terpadu secara kolaboratif.
- c. Penguatan layanan tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang akuntabel dan berintegritas.
- d. Penguatan kualitas tata kelola dan pengawasan.

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

1.2.1 Tugas

Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan perumahan perkotaan.

1.2.2 Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi antara lain:

- a. Perumusan kebijakan di bidang perumahan perkotaan;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan perkotaan;
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perumahan perkotaan;
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perumahan perkotaan;

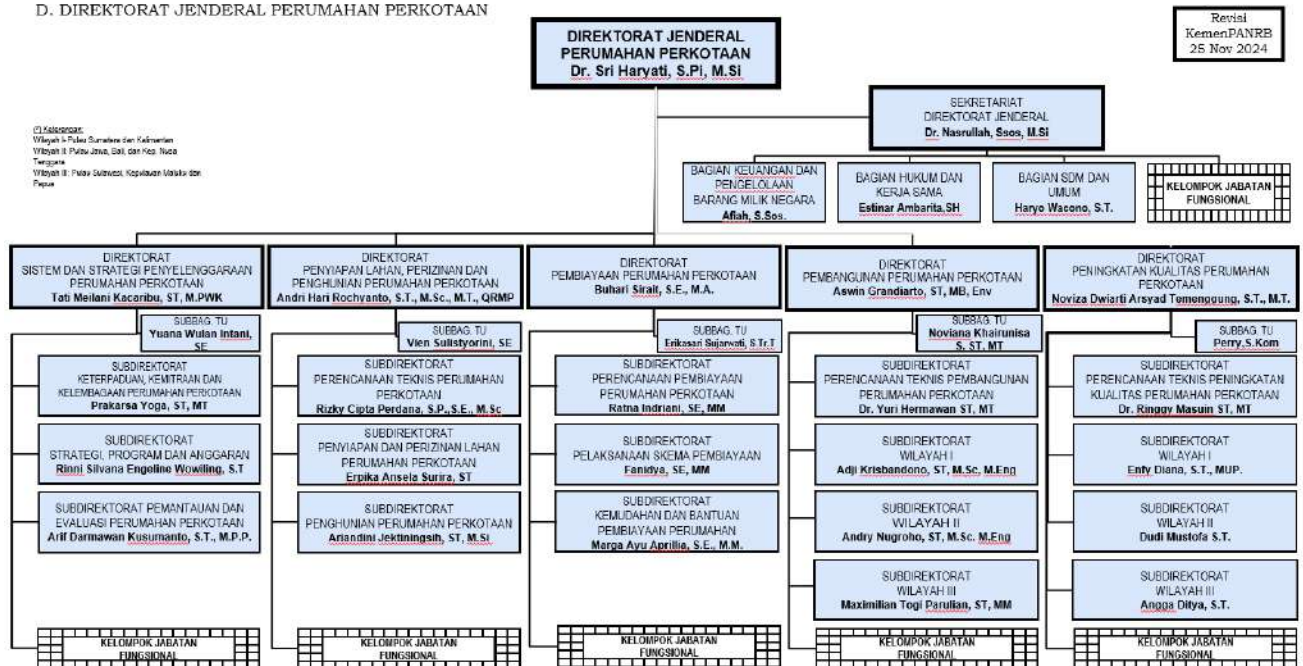
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan perkotaan;
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

1.2.3 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sesuai yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

- a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
- b. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan
- c. Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunan Perumahan Perkotaan
- d. Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan
- e. Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan
- f. Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

D. DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN



Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Sumber: Peraturan Menteri PKP No. 1 Tahun 2024

Susunan struktur organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman di atas dapat dijelaskan sesuai tugas dan fungsi, sebagai berikut:

- a. **Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan**

Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan direktorat jenderal. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

1. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dalam penyusunan laporan akuntansi dan laporan barang milik negara;
2. Pelaksanaan administrasi perbendaharaan dan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak;
3. Pengelolaan barang milik negara di lingkungan direktorat jenderal;
4. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum serta penyelenggaraan komunikasi publik direktorat jenderal;
5. Pelaksanaan pembinaan urusan sumber daya manusia, organisasi dan tata laksana, serta reformasi birokrasi;
6. Pelaksanaan penyusunan laporan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan direktorat jenderal; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat jenderal.

b. Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan perumusan kebijakan dan pengembangan strategi, penyusunan program dan anggaran, pelaksanaan kemitraan dan kelembagaan, pengelolaan data dan sistem informasi, serta pemantauan dan evaluasi kinerja di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan strategi pembangunan perumahan perkotaan jangka panjang dan jangka menengah;
2. Penyusunan rencana dan pengembangan strategi, serta rencana strategis pembangunan perumahan perkotaan;
3. Pelaksanaan dan pengendalian program dan anggaran tahunan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan sumber pembiayaan lainnya di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
4. Pelaksanaan kemitraan dan pembinaan kelembagaan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
5. Pelaksanaan kerja sama dan pinjaman dan hibah luar negeri bidang pembangunan perumahan perkotaan;

6. Pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
7. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
8. Pelaksanaan urusan tata direktorat.

c. Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan

Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan kebijakan, standar, prosedur, dan kriteria, penyusunan rencana penyiapan lahan, koordinasi perizinan, koordinasi pelaksanaan pemanfaatan dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program, anggaran, dan rencana teknis koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
2. Pelaksanaan pembinaan dan penyusunan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria koordinasi penyiapan lahan, perizinan, dan penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
4. Pelaksanaan koordinasi penyiapan lahan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
5. Pelaksanaan koordinasi penyiapan perizinan di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
6. Pelaksanaan koordinasi, pendampingan dan validasi data penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

d. Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan

Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran, penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penyaluran kemudahan dan bantuan, koordinasi dan sinkronisasi, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan dan supervisi, pelaksanaan kemitraan dan pembiayaan kreatif serta pemantauan, evaluasi dan

pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan program dan anggaran di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
2. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembiayaan perumahan perdesaan serta penyaluran kemudahan dan bantuan pembiayaan perumahan perkotaan;
4. Koordinasi dan sinkronisasi dalam pelaksanaan pembiayaan perumahan perkotaan;
5. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
6. Penyiapan penetapan sumber pendanaan dan skema pembiayaan perumahan perkotaan;
7. Pelaksanaan pelayanan publik di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
8. Pelaksanaan kemitraan, kerja sama pemerintah dengan badan usaha, investasi dan pembiayaan kreatif di perkotaan;
9. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembiayaan perumahan perkotaan;
10. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembiayaan perumahan perkotaan; dan
11. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

e. Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan

Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan pembangunan, penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan data dan informasi, serta pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan perumusan kebijakan dan strategi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;

2. Penyiapan penyusunan program dan anggaran penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
3. Pelaksanaan kebijakan pembangunan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
4. Penyiapan perencanaan teknis penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
5. Penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
6. Pelaksanaan pengelolaan data dan pengembangan sistem informasi penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
7. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan;
8. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan rumah susun, rumah khusus serta prasarana, sarana dan utilitas umum di bidang pembangunan perumahan perkotaan; dan
9. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

f. Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan

Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, norma, standar, prosedur, dan kriteria, fasilitasi pendataan dan verifikasi, fasilitasi pemberdayaan dan kemitraan, pelaksanaan bantuan stimulan, serta pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan penyusunan program anggaran, penyusunan rencana teknis, penyusunan standar pedoman di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
2. Fasilitasi pendataan dan verifikasi rumah tidak layak huni di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;

3. Fasilitasi pemberdayaan masyarakat, fasilitasi akses kemitraan, dan layanan jasa bidang di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
4. Penyiapan penerima bantuan dan pendampingan dalam pelaksanaan bantuan stimulan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan;
5. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dan pemanfaatan bantuan di bidang peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan; dan
6. Pelaksanaan urusan tata usaha direktorat.

1.3 Aspek Strategis (Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan)

1.3.1 Tujuan

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada tahun 2025 – 2029 bertujuan untuk meningkatkan rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau di perkotaan. Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

- a. Pembangunan hunian baru layak huni di perkotaan, baik vertikal maupun tapak;
- b. Peningkatan kualitas rumah MBR yang tidak memenuhi syarat kelaikan rumah;
- c. Peningkatan akses rumah tangga terhadap fasilitas pembiayaan perumahan atau bantuan subsidi/kemudahan perumahan;
- d. Penanganan permukiman kumuh secara terpadu di perkotaan.

1.3.2 Asta Cita Sektor Perumahan

Asta Cita sektor perumahan adalah implementasi dari delapan tujuan pemerintahan yang berfokus pada penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini diwujudkan melalui program nasional seperti "Program 3 Juta Rumah", yang didukung oleh berbagai kementerian, lembaga, dan sektor swasta seperti Bank BTN, Bank BRI, dan Badan Bank Tanah. Program ini juga mencakup pembangunan infrastruktur pendukung dan mendorong pergerakan ekonomi melalui sektor konstruksi, bahan bangunan, dan tenaga kerja. Tiga Pilar Utama Asta Cita Sektor Perumahan antara lain:

- a. Penyediaan hunian yang layak dan terjangkau: Pemerintah melalui program nasional seperti "Program 3 Juta Rumah" menargetkan penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya MBR.
- b. Pengembangan infrastruktur pendukung: Pembangunan rumah juga diiringi dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih, yang

dilakukan secara terintegrasi dengan pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat.

- c. Penggerak ekonomi nasional: Sektor perumahan dipandang sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi yang dapat menggerakkan sektor konstruksi, bahan bangunan, tenaga kerja, dan investasi swasta, sehingga memberikan dampak ekonomi yang luas.



Gambar 1. 2 Asta Cita dan Visi Misi RPJMN 2025 – 2029

Sumber: RPJMN Tahun 2025 – 2029



Gambar 1. 3 Peta Jalan Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah
(Sumber : Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian PKP)

1.3.3 Sasaran Program dan Kegiatan

Pencapaian tujuan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan didukung melalui dua program yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, yaitu:

a. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki sasaran berupa meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mendapatkan amanat yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang berupa:

- 1) Menyediakan 879.987 unit rumah melalui pembangunan 14.710 unit rumah susun, 36.840 unit rumah khurus reguler, 337.912 unit rumah tidak layak huni yang ditangani secara swadaya, dan 489.529 unit rumah melalui fasilitasi pembiayaan perumahan;
- 2) Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang melayani 32.582 unit rumah, dengan rincian 22.832 unit rumah tapak dan 9.750 unit hunian vertikal; dan
- 3) Menangani 268 hektar permukiman kumuh di perkotaan secara terpadu.

Untuk mengukur pencapaian program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, digunakan tiga indikator sebagai berikut:

- 1) Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan.

- 2) Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan.
- 3) Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di Wilayah Perkotaan.

b. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen diselenggarakan untuk memastikan optimalitas organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Adapun sasaran Program Dukungan Manajemen adalah meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya dalam proses penyelenggaraan perumahan perkotaan yang diukur menggunakan indikator Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

1.4 Isu Strategis

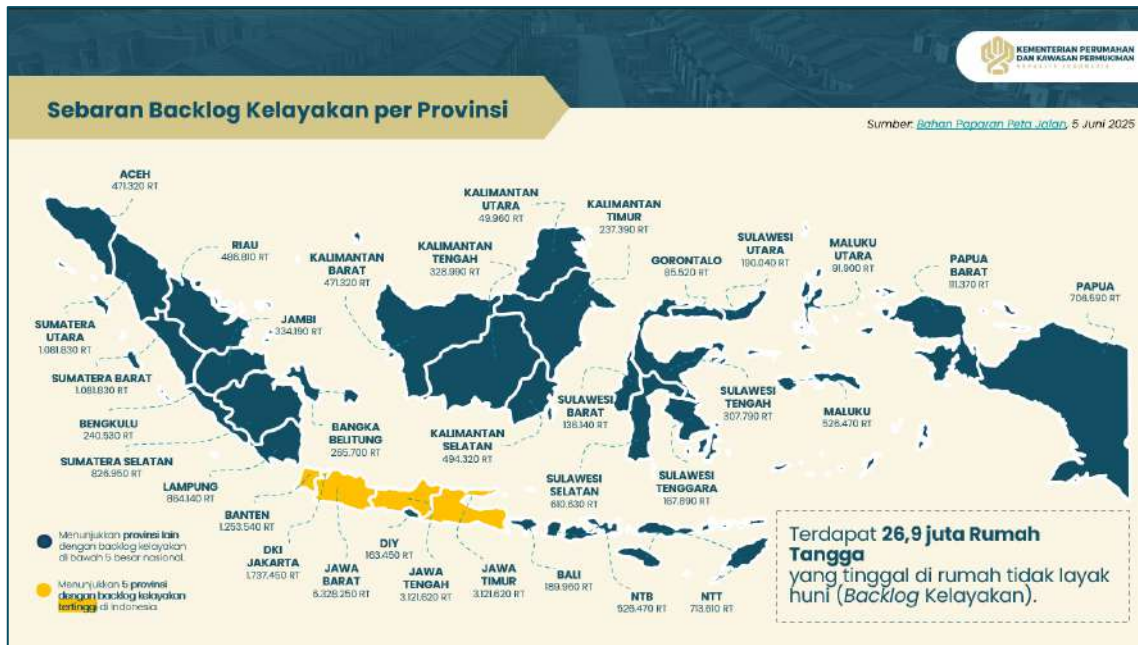
Isu strategis merupakan hasil rumusan yang didasarkan pada identifikasi masalah terkait perumahan perkotaan, terutama kondisi atau permasalahan yang memiliki dampak signifikan apabila tidak segera ditangani. Di sisi lain, isu strategis juga dapat memuat potensi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan yang tidak akan mencapai titik optimal apabila tidak segera dikembangkan. Isu strategis menjadi hal penting yang harus diperhatikan dalam penyusunan rencana karena menjadi salah satu acuan dalam penyusunan program untuk mencapai tujuan. Isu Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan antara lain:

a. Tingginya Angka Backlog Perumahan

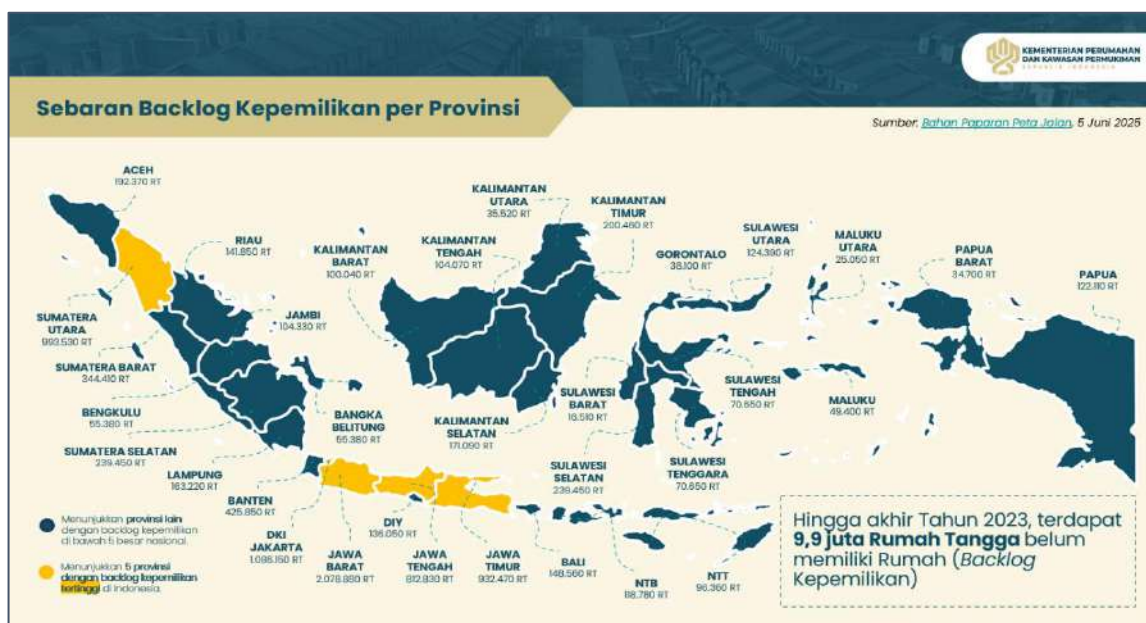
Kondisi backlog perumahan di Indonesia saat ini terbagi menjadi dua dimensi backlog yang cukup krusial, yaitu backlog kepemilikan dan backlog kualitas atau kelayakan. Backlog kepemilikan menunjukkan rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, sementara backlog kualitas menunjukkan rumah tangga yang tinggal di hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan. Berdasarkan data dari Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) tahun 2024, tercatat sebanyak 9,9 juta rumah tangga di Indonesia tidak memiliki rumah dan 26,9 juta rumah tangga lainnya tinggal di rumah tidak layak huni.

Tingginya backlog kepemilikan menandakan masih banyak keluarga yang belum memiliki rumah sendiri dan bertempat tinggal dengan cara menumpang, mengontrak rumah, atau menempati hunian tanpa status hukum yang sah. Sementara itu, backlog

kualitas atau backlog kelayakan menunjukkan rumah tangga dengan tempat tinggal yang tidak layak secara standar teknis, kesehatan, maupun lingkungan hidupnya.



Gambar 1. 5 Persebaran Backlog Kualitas di Indonesia per Juni 2025
Sumber: RPJMN Tahun 2025 – 2029



Gambar 1. 4 Persebaran Backlog Kepemilikan di Indonesia 2025
(Sumber : bahan Paparan Peta Jalan 2025)

b. Keterbatasan Lahan dan Tingginya Harga Tanah

Pertambahan jumlah penduduk di perkotaan yang tidak diimbangi dengan penyediaan hunian yang memadai akan mendorong peningkatan permintaan lahan, terutama di kota-kota besar. Di sisi lain, ketersediaan lahan terus mengalami penurunan akibat terjadinya alih fungsi lahan, pertumbuhan populasi dan peningkatan kepadatan

penduduk, serta fragmentasi ruang kota. Keterbatasan lahan yang ada di pusat kota menyebabkan terjadinya lonjakan harga tanah. Kenaikan harga tanah terutama di wilayah perkotaan membuat tanah menjadi komoditas yang semakin tidak terjangkau bagi MBR. Tingginya harga tanah juga menjadi hambatan bagi program-program subsidi perumahan dari pemerintah, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), serta Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Masalah terkait ketersediaan lahan untuk pembangunan perumahan juga disebabkan oleh faktor belum optimalnya pendataan dan pemetaan ketersediaan lahan kosong secara mutakhir dan menyeluruh di seluruh wilayah perkotaan di Indonesia. Di sisi lain, terdapat instansi pusat maupun daerah yang memiliki aset lahan namun belum dimanfaatkan secara optimal karena proses identifikasi, pengalihan fungsi, serta pengelolaan lahannya masih terkendala oleh belum optimalnya koordinasi lintas sektoral, legalitas aset, serta belum optimalnya perencanaan secara terpadu.

c. Akses Pembiayaan yang Terbatas

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mengembangkan berbagai skema pembiayaan berupa FLPP, SSB, SBUM, dan BP2BT. Namun, realisasi dari program-program tersebut belum optimal untuk menjangkau wilayah padat serta kelompok pekerja informal. Dengan kata lain, akses pembiayaan perumahan masih menjadi hambatan serius bagi kelompok MBR dan pekerja sektor informal di kawasan perkotaan.

Kendala lain terkait pembiayaan yang masih dihadapi antara lain keterbatasan anggaran, kompleksitas persyaratan, serta belum optimalnya pemerataan layanan untuk seluruh wilayah di Indonesia. Salah satu skema alternatif yang digunakan untuk mengatasi masalah tersebut adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Skema tersebut menjadi alternatif pembiayaan di luar APBN untuk menutup kekurangan pendanaan secara signifikan. Pemanfaatan skema KPBU serta adanya peran aktif dari sektor swasta akan mendorong percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau dengan tidak hanya bertumpu pada dana dari pemerintah.

Meski demikian, masih terdapat tantangan dalam pemanfaatan skema KPBU seperti lamanya proses penyiapan proyek, belum terpenuhinya *Readiness Criteria* (RC), keterbatasan lahan yang *clean and clear*, serta belum kuatnya komitmen Pemerintah Daerah sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK).

d. Kualitas Permukiman Kumuh

Permukiman kumuh di perkotaan merupakan masalah struktural kompleks yang timbul akibat pertumbuhan hunian informal tanpa perencanaan tata ruang dan minim infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, jalan, dan drainase. Keterbatasan daya beli dan ketimpangan akses terhadap hunian layak memperparah kondisi ini. Data SIPPKPK Kementerian PUPR menunjukkan lebih dari 8.000 hektare kawasan kumuh tersebar di 300+ kabupaten/kota hingga 2023, mayoritas di wilayah strategis namun terabaikan dari sisi pelayanan dasar dan legalitas lahan.

BPS mencatat pada 2024 hanya 66,26% rumah tangga perkotaan tinggal di rumah layak, dan 36,85% masih menghuni Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), mencerminkan rendahnya kualitas hidup masyarakat urban. Permasalahan juga diperparah oleh lemahnya legalitas hunian, minimnya data spasial akurat, serta kurangnya partisipasi masyarakat. Pendekatan sektoral yang terpisah-pisah membuat penanganan menjadi lamban, diperparah oleh keterbatasan anggaran daerah, lambatnya legalisasi lahan, rendahnya integrasi data, dan minimnya pelibatan warga.

e. Kurangnya Koordinasi Antar Sektor dan Pemerintah Daerah

Penyelenggaraan perumahan nasional membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan antar jenjang pemerintahan, mencakup pertanahan, perencanaan, infrastruktur, dan pembiayaan. Namun, lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah serta ketidaksesuaian kebijakan membuat program perumahan sering tidak tepat sasaran. Hingga pertengahan 2024, hanya 174 dari 514 kabupaten/kota yang memiliki RP3KP yang terintegrasi dengan RPJMD dan RTRW, padahal dokumen RP3KP merupakan prasarat penting untuk penyusunan rencana aksi dan penganggaran sector perumahan yang sinkron dengan kebijakan pusat.

Pada tingkat horizontal, tumpang tindih kewenangan antar kementerian menyebabkan kebijakan terfragmentasi. Perbedaan fokus antar lembaga menghambat realisasi program terutama dalam hal pengadaan lahan, pembangunan infrastruktur, dan penyaluran bantuan seperti BSPS dan Rusun.

Selain itu, sistem data perumahan belum terintegrasi secara nasional. Platform seperti SIBARU, e-RTLH, dan SIPPKPK masih berjalan sendiri tanpa interoperabilitas, menghambat validasi data dan pengambilan kebijakan berbasis bukti. Tanpa perbaikan tata kelola dan koordinasi yang solid, program perumahan berisiko tidak efisien, tidak akuntabel, dan tidak adaptif terhadap kebutuhan daerah.

f. Ketidakseimbangan antara Pertumbuhan Penduduk dan Penyediaan Hunian

Pertumbuhan penduduk dan urbanisasi pesat di Indonesia memicu ketimpangan antara kebutuhan dan penyediaan hunian, terutama di kota. BPS (2025) mencatat jumlah penduduk mencapai 284,4 juta, sementara proporsi penduduk perkotaan diperkirakan naik menjadi 70% pada 2045 (Bappenas, 2023). Sayangnya, penyediaan rumah belum mampu mengikuti laju ini. Kurangnya hunian layak, terjangkau, dan terintegrasi dengan infrastruktur menyebabkan tumbuhnya permukiman informal yang padat, tanpa legalitas, dan tidak memenuhi standar.

Masalah ini diperparah oleh keterbatasan lahan dan lambatnya penyesuaian tata ruang. Tanpa perencanaan yang tepat, kondisi ini berisiko menambah *backlog* dan memperluas kawasan kumuh di masa depan.

g. Kurangnya Data dan Sistem Informasi yang Akurat

Salah satu hambatan utama dalam penyelenggaraan perumahan di perkotaan adalah keterbatasan sistem data yang akurat, terkini, dan terintegrasi. Lemahnya sistem informasi berdampak langsung pada perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program perumahan, terutama bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di tengah urbanisasi dan bonus demografi.

Data perumahan masih tersebar di berbagai instansi tanpa keterpaduan, menyebabkan tumpang tindih informasi, perbedaan metode, dan lemahnya validasi. Akibatnya, terjadi inefisiensi, salah sasaran bantuan, dan keterlambatan program.

Minimnya digitalisasi, belum optimalnya pemanfaatan teknologi seperti GIS dan big data, serta tidak adanya integrasi dengan kebijakan tata ruang dan transportasi memperbesar risiko munculnya permukiman tidak layak baru di kota.

BAB 2

Penetapan Kinerja

RENCANA
AKSI
TA 2025

BAB II

PENETAPAN KINERJA

2.1 Target Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 – 2029

Upaya perwujudan arah kebijakan nasional dalam hal meningkatkan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan tentunya erat kaitannya dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang memiliki tugas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan suburban pemerintahan kawasan permukiman. Pelaksanaan program perumahan dan Kawasan permukiman secara teknis dilaksanakan oleh 3 unit organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yaitu Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Pedesaan, dan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam melaksanakan program tersebut, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan memiliki kegiatan Penyediaan Akses Perumahan yang Layak Huni di wilayah perkotaan. Sasaran strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan (DJP Perkotaan) merupakan bagian dari Perencanaan Strategis (Renstra) yang merujuk pada tujuan yang ingin dicapai dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang kemudian dikembangkan menjadi Sasaran Strategis 1 (satu) dan 2 (dua). Sasaran Strategis 1 yaitu meningkatnya penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan serta Sasaran Strategis 2 yaitu meningkatnya kualitas tata kelola dan pengawasan intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Perihal besaran target indikator kinerja sasaran strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2. 1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian PKP 2025-2029

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman							
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100
	Persentase luas permukiman kumuh	%	100	100	100	100	100

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	yang ditangani secara terpadu						
	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	100	100	100	100	100
Dukungan Manajemen							
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	%	84,9	86,7	88,5	90,3	91,8

Sumber: Penjenjangan Kinerja Renstra Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029

Sebagai tindak lanjut dari penyesuaian program (*redesign*), Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melaksanakan dua program utama, yaitu:

- a. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Sasaran Program Perumahan dan Kawasan Permukiman (SP-5), yaitu: meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) untuk Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan diperhitungkan berdasarkan:
 - 1) Persentase hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan, dengan target pembangunan dan renovasi 1 juta rumah di 105 kota wilayah perkotaan;
 - 2) Persentase peningkatan penanganan permukiman kumuh di wilayah perkotaan;
 - 3) Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan.
- b. Program Dukungan Manajemen, yang mencakup semua unit kerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Sasaran Program Dukungan Manajemen (SP - 5), yaitu: Meningkatnya kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan. Indikator Kinerja Sasaran Program (IKSP) disusun berdasarkan perhitungan tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Tabel 2. 2
Sasaran Program dan Indikator Kinerja Sasaran Program Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025 – 2029

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / IKS / IKP	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
UNOR	DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN						
PROGRAM	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN						

PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS / SASARAN PROGRAM / IKS / IKP	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan						
SP	Meningkatnya Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan						
IKSP	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	%	100	100	100	100	100
	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100
PROGRAM	DUKUNGAN MANAJEMEN						
SS	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP						
SP	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
IKSP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	%	85,15	86,26	87,50	88,85	90,01

Sumber: Penjenjangan Kinerja Renstra Ditjen Perkotaan 2025-2029

Pemenuhan kebutuhan hunian yang layak, aman dan terjangkau di wilayah perkotaan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan melalui Program Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta Program Dukungan Manajemen. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman mencakup program penyediaan hunian layak huni; peningkatan kualitas rumah tidak layak huni; peningkatan akses rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan perumahan; peningkatan akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan; serta peningkatan kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan.

Dalam rangka penguatan dukungan manajemen dan tata kelola di masing-masing unit kerja, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan menyusun beberapa kegiatan guna meningkatkan layanan dukungan manajemen dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan. Sasaran Kegiatan (SK) serta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dari setiap program yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 3
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025 – 2029

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKSS/IKP/IKK	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN							
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							
Kegiatan 1	Penyelenggaraan Sistem Dan Strategi Perumahan Perkotaan						
	SK : Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	IKK : Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	%	100	100	100	100	100
	IKK: Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100
	IKK: Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100
	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Pemrograman, Anggaran dan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	6	-	-	-	-
	2. Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Pemrograman, Anggaran dan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	-	25	25	25	25
	3. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	1	1	1	1
	4. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	2	56	56	56	56
Kegiatan 2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan						
	SK : Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan						
	IKK : Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan	%	100	100	100	100	100
	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Program, Anggaran, dan Rencana Teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	4	23	23	23	23
	2. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKSS/IKP/IKK	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	3. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan*	Dokumen	-	1	1	1	1
	4. Jumlah NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan	NSPK	1	1	1	1	1
	5. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	-	-	-	-
	6. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan*	Dokumen	-	2	2	2	2
	7. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Perizinan, dan Penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan	Dokumen	4	-	-	-	-
	8. Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Perizinan, dan Penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan*	Dokumen	-	3	3	3	3
	9. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian perumahan perkotaan	Laporan	3	-	-	-	-
	10. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian perumahan perkotaan*	Laporan	-	3	3	3	3
Kegiatan 3	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan						
	SK : Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan						
	IKK : Persentase Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan hyang Terjangkau di Wilayah Perkotaan	%	100	100	100	100	100
	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	2	21	21	21	21
	2. Jumlah NSPK Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	NSPK	3	3	3	3	3
	3. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Kegiatan	1	-	-	-	-
	4. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitasi Penyaluran Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan Perkotaan*	Kegiatan	-	1	1	1	1
	5. Jumlah Kesepakatan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan	Kesepakatan	1	-	-	-	-
	6. Jumlah Kesepakatan Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan	Kesepakatan	-	1	1	1	1

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKSS/IKP/IKK	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	7. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Laporan	3	3	3	3	3
	8. Jumlah Orang yang Tersosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Orang	-	100	100	100	100
Kegiatan 4	Penyediaan Rumah Yang Layak Huni di Perkotaan						
	SK 1: Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan						
	IKK 1: Persentase pelaksanaan pemrograman, penganggaran, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Perumahan perkotaan	%	100	100	100	100	100
	IKK 2 : Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100
	IKK 3 : Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100
	IKK 4 : Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana, dan utilitas umum di perkotaan	%	100	100	100	100	100
	IKK 5 : Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal	%	100	100	100	100	100
	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	5	24	24	24	24
	2. Jumlah NSPK penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	NSPK	1	1	1	1	1
	3. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	1	1	1	1
	4. Jumlah laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Laporan	7	10	10	10	10
	5. Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-
	6. Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-
	7. Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-
	8. Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Perkotaan	Unit	-	199	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKSS/IKP/IKK	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	9. Jumlah rumah tapak yang mendapatkan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di perkotaan	Unit	-	5708	5708	5708	5708
	10. Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perkotaan	Unit	-	9210	9210	9210	9210
	11. Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	100	156	-	-	-
	12. Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	Unit	-	65	-	-	-
	13. Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perkotaan	Hektar	-	69	68	68	69
	14. Jumlah Rumah Susun Hunian di Wilayah Perkotaan	Unit	-	2789	3380	3510	3510
	15. Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	Unit	960	240	-	-	-
	16. Jumlah Unit yang mendapat bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Vertikal di Perkotaan	Unit	-	-	3250	3250	3250
	SK 2: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perkotaan						
	IKK 2 : Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di perkotaan	%	100	100	100	100	100
	1. Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perkotaan	Hektar	-	69	68	68	69
	2. Jumlah Rumah Bersanitasi Layak di Wilayah Perkotaan	Unit					
Kegiatan 5	Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan						
	SK 1 : Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan						
	IKK 1 : Persentase penyelenggaraan kebijakan, data, dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan	%	100	100	100	100	100
	IKK 2 : Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100
	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	6	24	24	24	24

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKSS/IKP/IKK	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	2. Jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Layanan	7	7	7	7	7
	3. Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Laporan	6	4	4	4	4
	4. Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Peningkatan Kualitas di Perkotaan	Unit	5412	83125	83125	83125	83125
	SK 2 : Terbangunnya Rumah Layak Huni di Perkotaan						
	IKK 2 : Persentase Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni Baru di Wilayah Perkotaan	%	100	100	100	100	100
	1. Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Pembangunan Baru di Perkotaan						
	PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN						
SS	SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP						
IKSS	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP	%	84,9	86,7	88,5	90,3	91,8
SP	Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
IKSP	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	%	85,15	86,26	87,50	88,85	90,01
Kegiatan 1	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	SK 1 : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan						
	IKK 1 : Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	%	87,15	87,80	88,62	89,54	90,29
	1. Jumlah Layanan BMN	Layanan	1	20	20	20	20
	2. Jumlah Layanan Hukum	Layanan	3	3	3	3	3
	3. Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	3	3	3	3	3

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKSS/IKP/IKK	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	4. Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	55	55	55	55
	5. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
	6. Jumlah Layanan Sarana Internal	Layanan	68	68	68	68	68
	7. Jumlah Layanan Manajemen SDM	Layanan	-	1	1	1	1
	8. Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	-	1	1	1	1
	9. Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran	Layanan	1	1	1	1	1
	10. Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	-	1	1	1	1
	11. Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	2	2	2	2	2
	12. Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	55	55	55
	13. Jumlah Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	-	1	1	1	1
	SK 2 : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						
	IKK 2 : Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	%	88,32	88,98	89,64	90,30	90,97
	1. Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1
	2. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
	3. Jumlah Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	20	20	20	20
	4. Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1
	SK 3 : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan						

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKSS/IKP/IKK	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	IKK 3 : Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76
	1. Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1
	2. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
	3. Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1
	SK 4 : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan						
	IKK 4 : Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan	%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76
	1. Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1
	2. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
	3. Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1
	SK 5 : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan						
	IKK 5 : Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan	%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76
	Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1
	SK 6 : Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan						
	IKK 6 : Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76
	1. Jumlah Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/IKSS/IKP/IKK	SATUAN	TARGET				
			2025	2026	2027	2028	2029
	2. Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1
	3. Jumlah Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1

Sumber: Penjenjangan Kinerja Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 - 2029

2.2 Target *Output* Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025

Target *output* kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 disusun berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP TA 2025 Nomor : SP DIPA – 146.05.1.694311/2025 tanggal 02 Desember 2024 dan Pengesahan Revisi Anggaran ke-9 pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor : S-734/AG/AG.3/2025 tanggal 25 Agustus 2025, sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Target *Output* Kegiatan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025

NO	SASARAN/INDIKATOR	TARGET
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman		
1	Jumlah Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan - Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan - Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan - Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	81 Rekomendasi Kebijakan/Laporan
2	Jumlah Kemitraan - Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan
3	Jumlah Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria - NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan - NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan - NSPK Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	5 NSPK
4	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Publik - Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - Data dan Informasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan - Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan - Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	10 Dokumen, Data, Peta
5	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman - Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan - Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	342 unit
6	Jumlah Dukungan Teknis - Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan - Dokumen Dukungan Teknis Perijinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	5 Dokumen
7	Jumlah OP Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman - Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan	6.540 unit
8	Jumlah Laporan Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	74 Laporan

NO	SASARAN/INDIKATOR	TARGET
	- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	
9	Kegiatan Koordinasi - Koordinasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Kegiatan
10	Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman - Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan - Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan - Rumah Susun ASN dan Hankam (IKN) Perumahan Perkotaan - Rumah Swadaya Perkotaan	20.311 unit
Program Dukungan Manajemen		
1	Layanan Dukungan Manajemen Internal	20 Layanan
2	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	118 unit
3	Layanan Manajemen Kinerja Internal	3 Dokumen

Sumber: SP DIPA – 146.05.1.694311/2025

2.3 Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 sebagai berikut:



**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
 REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sri Haryati**
 Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
 Jabatan : a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal (berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu)

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Agustus 2025

Pihak Kedua

DIDYK CHOIROEL

Pihak Pertama

SRI HARYATI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN			
NO	SASARAN PROGRAM	INDEKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatkan Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	1. Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100%
		2. Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	-
		3. Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	100%
2	Meningkatkan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1. Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	85,15 %
PROGRAM		PAGU APBN	
1. Perumahan dan Kawasan Permukiman		Rp	2.768.159.109.000,00
2. Dukungan Manajemen		Rp	11.174.838.000,00
		Rp	2.779.334.007.000,00
Jakarta, 26 Agustus 2025			
a.n. MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN, SEKRETARIS JENDERAL		DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN	
DIDYK CHOIROEL		SRI HARYATI	

Gambar 2. 1 Lembar Perjanjian Kinerja Awal Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
 Sumber: Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, 2025

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Tahun 2025 telah dilengkapi dengan 4 indikator kinerja sebagai alat ukur atas pencapaian kinerja sasaran program. Indikator-indikator tersebut antara lain: Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan dengan target sebesar 100%; Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan; Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan; serta Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

Adapun metode perhitungan dari masing-masing target indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 5
Metode Perhitungan Capaian Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah Perkotaan	1	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	Indikator gabungan	Capaian dihitung dari penjumlahan indikator berikut:	Non Kumulatif	Internal dan Eksternal
				a Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi langsung (bobot 70%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu : Intervensi langsung (menggunakan APBN Kementerian PKP) antara lain : Bantuan Rumah Susun, Bantuan Rumah Khusus, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya, serta Bantuan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan wilayah perkotaan. Capaian (%) = $100 \times ((U+V+W+X)/B)$ Keterangan: U : Realisasi Rumah Khusus (unit) V : Realisasi Bantuan Rumah Swadaya (unit) W : Realisasi Rumah Susun (unit) X : Realisasi Rumah Tangga yang mendapat Bantuan Kemudahan dan Bantuan Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan (unit) B : Target tahunan (unit) sesuai Lampiran PK		

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				b Persentase hunian layak dan terjangkau melalui Intervensi tidak langsung (bobot 10%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan terhadap target tahunan, yaitu: Jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit). A= 100% x (P/B) Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) Intervensi Tidak Langsung P: Realisasi rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah perkotaan yang difasilitasi dengan sumber dana diluar APBN Kementerian PKP (unit) B: Target intervensi tidak langsung (unit)		
				c Persentase unit rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) (bobot 20%) Capaian dihitung dari perbandingan realisasi jumlah unit rumah di wilayah perkotaan yang menerima bantuan PSU tapak dan vertikal terhadap target tahunan. A= 100 x ((P+Q)/B) Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) P: Realisasi Rumah di wilayah perkotaan yang mendapat Bantuan PSU tapak (unit) Q: Realisasi Rumah di wilayah perkotaan yang mendapat Bantuan PSU vertikal (unit) B: Target tahunan PSU Tapak (Unit) dan PSU Vertikal (unit) sesuai PK		
	2	Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	Indikator tunggal	Dihitung dari perbandingan luasan kumuh tertangani terhadap target luasan kumuh yang ditangani setiap tahun. Capaian Kinerja (%) = 100 x (U/target per tahun) Keterangan: A: Capaian Kinerja (%) U: Capaian luasan kumuh yang ditangani (hektar) Target per tahunan (hektar) sesuai PK	Non Kumulatif	Internal
	3		Indikator gabungan	Capaian dihitung dari penjumlahan indikator berikut:	Non Kumulatif	Internal

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			a Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan (bobot 90%). Capaian dihitung dari realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan terhadap target tahunan dikali 100%. $\text{Capaian (\%)} = 100 \times (\text{realisasi}/\text{target})$ Target tahunan sesuai PK		
	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan		b Persentase desa yang memiliki 100% RLH (bobot 10%). Capaian Renstra Ditjen Perumahan Perkotaan 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target tahunan. $A = 100 \times ((U)/B)$ A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa tahunan (desa) U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perkotaan (desa) Target tahunan: 2025-2029: 45 desa/ tahun Total: 225 desa Kontribusi Unor terhadap Capaian RPJMN 2025-2029 Capaian dihitung dari perbandingan realisasi desa di wilayah perkotaan yang mendapat bantuan/intervensi penurunan RTLH dari Ditjen Perumahan Perkotaan hingga memenuhi desa 100% RLH terhadap target penanganan selama 2025-2029 yaitu 750 desa. $A=Y+(((U)/B)) \times 100 \times (Z-Y)$ A= Capaian (%) B= Target penanganan jumlah desa secara nasional yaitu 750 desa U= Realisasi jumlah desa yang diintervensi oleh Ditjen Perumahan Perkotaan (desa) Y= Baseline penanganan 2024 (24,81%) Z= Target penanganan pada 2029 (25,61%) Target tahunan (%): 2025-2029: 45 desa/ tahun		
Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	Komposit dari indikator sebagai berikut:	Nilai Pengawasan Kearsipan Internal (Penilaian terhadap pengelolaan arsip dinamis dan ketersediaan sumber daya kearsipan) oleh Biro Umum (10%)		

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
		1. Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan	a. Pengelolaan Arsip Dinamis (50%) yang dihitung berdasarkan: 1) Pengendalian Naskah Dinas (25%) 2) Penggunaan Arsip (25%) 3) Pemeliharaan Arsip (25%) 4) Penyusutan Arsip (25%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan Kegiatan)
			b. Sumber Daya Kearsipan (50%) yang dihitung berdasarkan : 1) SDM kearsipan (50%) 2) Prasarana dan Sarana Kearsipan (50%)	Non Kumulatif	Internal
		2. Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
			a. Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen dalam penyampaian laporan dan usulan RKBMN (30%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan: 1) Ketepatan waktu penyampaian usulan RKBMN (40%) 2) Ketepatan waktu penyampaian LBP (30%) 3) Ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen penyampaian Laporan Wasdal (30%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
			b. Tindak lanjut pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan BMN (30%) yang dihitung berdasarkan: (Jumlah permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0 yang ditindaklanjuti pada t-0) dibagi dengan (Jumlah keseluruhan permohonan pemindahtanganan dan penghapusan BMN periode semester II pada t-1 s.d. semester I pada t-0) dikali 100%	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
			c. Tingkat Penetapan Status Penggunaan BMN (40%) pada setiap satuan kerja di lingkungan unit organisasi, yang dihitung berdasarkan jumlah BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya dibagi dengan total jumlah aset yang harus ditetapkan status penggunaannya dikali 100%	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
		3. Tingkat Layanan pembentukan produk hukum	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
			a. Tingkat efektivitas penyelesaian produk hukum: (25%) Jumlah usulan produk hukum (Surat Edaran, Juknis, Surat Keputusan Dirjen) yang terselesaikan dibagi dengan jumlah usulan produk hukum dikali 100%	Non Kumulatif	Internal dan eksternal
			b. Tingkat Efektivitas Penyusunan Perjanjian: (25%) Jumlah usulan Perjanjian yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Perjanjian dikali 100%	Non Kumulatif	Internal dan eksternal
			c. Tingkat Efektivitas Penyusunan Pertimbangan Hukum: (25%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
			Jumlah usulan Pertimbangan Hukum yang terselesaikan dibagi dengan jumlah Pertimbangan Hukum dikali 100%		
			d. Tingkat efektivitas advokasi hukum: (25%) Jumlah perkara yang ditangani dibagi dengan jumlah perkara dikali 100%	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
		4. Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana	Tingkat kepuasan layanan pembinaan, pengelolaan kepegawaian, dan organisasi tata laksana yang diselesaikan tepat waktu (10%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
		5. Nilai Kinerja Anggaran	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
			a. Nilai IKPA Unit Organisasi berdasarkan aplikasi MONEV-PA (60%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
			b. Nilai Pagu Minus di Unit Organisasi persentase jumlah total pagu dikurangi dengan nilai pagu minus unit organisasi (20%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
			c. Persentase satuan kerja yang dilakukan pembinaan kinerja pelaksanaan anggaran dibandingkan dengan total satuan kerja di Unit Organisasi (20%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
		6. Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI	Persentase jumlah rekomendasi atas temuan BPK-RI yang sudah ditindaklanjuti terhadap total jumlah Rekomendasi yang ditampilkan di SIPTL BPK-RI dikali 100% (10%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
		7. Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
			a. Jumlah laporan AKIP yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah laporan AKIP yang wajib diselesaikan Unit Organisasi dikali 100% (80%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
			b. Nilai Evaluasi AKIP Unit Organisasi (20%)	Non Kumulatif	Internal (Prosiding/Laporan/Kegiatan/Usulan)
		8. Tingkat Layanan Komunikasi Publik	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
			a. Persentase sentimen pemberitaan positif dan netral di media, dibandingkan dengan jumlah total pemberitaan (50%)	Non Kumulatif	Internal dan Eksternal

SASARAN		INDIKATOR KINERJA	JENIS INDIKATOR	METODE PERHITUNGAN		TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
				b.	Persentase jumlah pelayanan publik yang ditindaklanjuti terhadap pemohon pelayanan publik (50%)	Non Kumulatif	Internal dan Eksternal
			9.	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi	Persentase Ketersediaan Data dan Informasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman terhadap kebutuhan data (10%)	Non Kumulatif	Internal dan Eksternal
			10.	Tingkat Kualitas Laporan Penyelenggaraan SPIP	Penjumlahan dan Indikator kontributor dengan pembobotan (%) sebagai berikut: (10%)		
				a.	Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP Unit Kerja di lingkungan Unit Organisasi yang tepat waktu (40%)	Non Kumulatif	Internal
				b.	Terselenggaranya Penilaian Mandiri Maturitas SPIP di Unit Organisasi (40%)	Non Kumulatif	Internal
				c.	Nilai Komponen Struktur dan Proses Maturitas SPIP di Unit Organisasi (20%)	Non Kumulatif	Internal

Sumber: Metode Perhitungan Capaian Dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan 2025-2029

2.4 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2025

Berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) ke 1 pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Kementerian PKP TA 2025 Nomor : SP DIPA – 146.05.1.694311/2025 tanggal 02 Desember 2024 dan Pengesahan Revisi Anggaran ke-9 pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Nomor : S-734/AG/AG.3/2025 tanggal 25 Agustus 2025, DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 2.779.334.007-. Adapun rincian anggaran pada seluruh entitas kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan sebagai berikut:

Tabel 2. 6 DIPA Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025

NO	SASARAN/INDIKATOR	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			
1	7661.ABF Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana - Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan - Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan - Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan - Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	81 Rekomendasi Kebijakan/Laporan	28.381.176.000
2	7661.AEE Kemitraan - Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan	1 Kesepakatan	415.000.000
3	7661.AFA Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria - NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan - NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan - NSPK Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	5 NSPK	1.744.968.000
4	7661.BMA Data dan Informasi Publik - Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan - Data dan Informasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan - Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan - Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	10 Dokumen, Data, Peta	3.545.922.000
5	7661.CBB Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman - Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan - Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	342 unit	117.353.090.000
6	7661.CBR Dukungan Teknis - Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan - Dokumen Dukungan Teknis Perijinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	5 Dokumen	1.697.143.000
7	7661.CDB OP Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman - Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan	6.540 unit	216.483.562.000
8	7661.FAE Pemantauan dan Evaluasi Serta Pelaporan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	74 Laporan	35.168.042.000

NO	SASARAN/INDIKATOR	TARGET	ALOKASI ANGGARAN (Rp)
	- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan - Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan		
9	7661.PEA Koordinasi - Koordinasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1 Kegiatan	645.030.000
10	7661.RBB Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman - Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan - Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan - Rumah Susun ASN dan Hankam (IKN) Perumahan Perkotaan - Rumah Swadaya Perkotaan	20.311 unit	2.362.725.236.000
Program Dukungan Manajemen			
1	7676.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	20 Layanan	9.485.492.000
2	7676.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal	118 unit	742.346.000
3	7676.EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal	3 Dokumen	947.000.000

Sumber: SP DIPA – 146.05.1.694311/2025

2.5 Target Kinerja Triwulan

Salah satu komponen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yaitu Perjanjian Kinerja, memuat penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan di bawahnya untuk melaksanakan program/kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja.

2.5.1 Target Kinerja Triwulan Berdasarkan Indikator Kinerja Program

Dalam pelaksanaannya, target yang termuat dalam Perjanjian Kinerja dirincikan ke dalam suatu Rencana Aksi Kinerja yang memuat target Kinerja triwulanan dari target tahunan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan Rencana Aksi Kinerja tersebut akan menjadi dasar dalam penyelenggaraan komponen SAKIP berikutnya. Target kinerja triwulan yang disusun merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut sesuai dengan dokumen anggaran. Berikut kami sampaikan Target Kinerja Triwulan pada Unit Organisasi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2. 7 Target Rencana Aksi Kinerja di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan TA 2025

SASARAN PROGRAM/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET PK	TARGET CAPAIAN PER TRIWULAN			
			TW I	TW II	TW III	TW IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Program Perumahan dan Kawasan Permukiman						
Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah Perkotaan						
1.	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100%	16,67	36,67	75,33	100,00
2.	Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	-	-	-	-	-
3.	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di Wilayah Perkotaan	100%	5,00	10,00	71,00	100,00
Program Dukungan Manajemen						
4.	Tingkat kualitas dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	85,15%	17,23	32,73	48,51	85,15

Sumber : Exercise Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan

Keterangan :

- Kolom (1) adalah Sasaran Program beserta indikatornya;
- Kolom (2) adalah besaran target yang tercantum dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Awal sesuai dengan indikator pada kolom (1);
- Kolom (3) s.d (6) adalah besaran (%) target kinerja yang diharapkan untuk dicapai dalam waktu triwulan (3 bulan);
- Pengisian Target capaian per triwulan bersifat kumulatif (%)
- Apabila terdapat revisi Perjanjian Kinerja, maka kolom (2) diisi dengan besaran target yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Revisi dan kolom (3) diisi dengan besaran (%) target yang diharapkan untuk dicapai dalam waktu triwulan terhadap target revisi Perjanjian Kinerja;

Dalam menetapkan target kinerja triwulan masing-masing indikator kinerja program maka perlu pendetailan komponen pembentuk dari indikator tersebut. Penjelasannya sebagai berikut:

- Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan terdiri dari kegiatan pembangunan perumahan di wilayah perkotaan dan semua kegiatan terkait kebijakan, pelaksanaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, serta administrasi di bidang perumahan perkotaan. Sesuai DIPA yang diberikan pada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada Tahun Anggaran 2025 maka kegiatan pembangunan perumahan terdiri dari Pembangunan Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan, Pembangunan Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan, Pembangunan Rumah Susun ASN/TNI/POLRI, Pembangunan Rumah Susun MBR/Pekerja, Pembangunan Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN),

Pemeliharaan dan Perawatan Rumah Susun, dan Kegiatan Peningkatan Kualitas melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Untuk kegiatan pendukung pembangunan perumahan di wilayah perkotaan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan antara lain kegiatan Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana, Kegiatan Kemitraan, Kegiatan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria, Kegiatan Data dan Informasi Publik, Kegiatan Dukungan Teknis, Kegiatan Koordinasi, Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan.

Terdapat 2 (dua) kegiatan pembangunan perumahan di Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan pada tahun anggaran 2025, yaitu pembangunan rumah susun dan BSPS. Pembangunan rumah susun tahun 2025 ini semua paket merupakan paket lanjutan yang masuk dalam Paket *MultiYears Contract* (MYC) 2024 – 2025. Untuk program BSPS yang dijalankan di tahun ini sudah mengacu kepada DT SEN sesuai dengan arahan SKB 3 Menteri.

2. Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan pada Tahun 2025 ini Ditjen Perumahan Perkotaan tidak mendapat pagu anggaran terkait penanganan kumuh dan hal ini sejalan dengan target Dokumen Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 – 2029. Kegiatan penanganan permukiman kumuh ditargetkan muncul di tahun anggaran 2026 dan telah masuk dalam Usulan rencana APBN 2026.
3. Persentase Desa yang memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan dihitung melalui pendekatan intervensi penurunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di wilayah perkotaan. Bentuk intervensi penurunan RTLH yaitu Program Peningkatan Kualitas Perumahan melalui kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

2.5.2 Target Kinerja Triwulan Berdasarkan KRO/RO

Target Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap Indikator Kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai pada tahun tersebut sesuai dengan dokumen anggaran. Anggaran yang digunakan bertujuan untuk mewujudkan sasaran merupakan anggaran yang didasarkan pada DIPA pada tahun berjalan.

Tabel 2. 8
Target Kinerja Triwulan Berdasarkan KRO/RO

Sasaran Program/Indikator Kinerja Program	Target (%)	Target Capaian Kinerja (%)			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
TURBINWAS PUSAT					
ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100,00	12,70	35,01	66,18	100,00
AEE-Kerja sama	100,00	32,00	52,00	70,00	100,00
AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	100,00	12,11	36,44	67,11	100,00
BMA-Data dan Informasi Publik	100,00	12,75	34,31	66,69	100,00
CBR-Dukungan Teknis	100,00	10,00	30,00	70,00	100,00
FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	15,02	35,73	68,81	100,00
PEA-Koordinasi	100,00	20,50	46,00	71,50	100,00
DUKUNGAN MANAJEMEN PUSAT					
EBA-Layanan Dukungan Manajemen Internal	85,15	23,81	42,65	60,42	85,15
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	85,15	34,06	46,83	59,61	85,15
EBD-Layanan Manajemen Kinerja Internal	85,15	21,23	44,47	64,28	85,15
TURBINWAS BALAI/SATKER					
ABF-Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	100,00	15,06	40,79	72,08	100,00
FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	100,00	19,50	44,50	72,50	100,00
FISIK BALAI/SATKER					
CDB-OP Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	95,00	100,00	100,00	100,00
CBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	20,00	50,00	80,00	100,00
RBB-Prasarana Bidang Perumahan dan Permukiman	100,00	16,25	40,00	77,75	100,00

Sumber: Analisis Penulis, 2025

BAB 3

Penutup

RENCANA
AKSI
TA 2025

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Kinerja (Renaksi) Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025 merupakan dokumen strategis yang disusun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dokumen ini disusun dengan mengacu pada anggaran (DIPA) yang diberikan kepada Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta mendukung pencapaian target nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dokumen ini menekankan komitmen pemerintah dalam mewujudkan hak dasar warga negara atas hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan di wilayah perkotaan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Secara keseluruhan, Dokumen Renaksi difokuskan pada upaya untuk mengatasi isu strategis utama di bidang perumahan perkotaan, yaitu tingginya *backlog* perumahan (meliputi *backlog* kepemilikan sebanyak 9,9 juta rumah tangga dan *backlog* kualitas sebanyak 26,9 juta rumah tangga berdasarkan data tahun 2024), keterbatasan lahan serta lonjakan harga tanah akibat urbanisasi yang diproyeksikan mencapai 70% penduduk perkotaan pada tahun 2045, dan akses pembiayaan yang terbatas meskipun telah dikembangkan skema seperti Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM), Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT), dan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Isu-isu ini menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan yang terintegrasi, dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas, transparansi, serta sinergi lintas sektoral untuk mendukung agenda nasional seperti Reformasi Birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Proyek Strategis Nasional (PSN) Nomor 75 tentang Pembangunan 3 Juta Rumah Nasional.

Tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PKP Nomor 1 Tahun 2024, mencakup perumusan kebijakan, pelaksanaan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), bimbingan teknis, supervisi, evaluasi, serta administrasi di bidang perumahan perkotaan. Tujuan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan adalah meningkatkan persentase rumah

tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau di perkotaan melalui dua program utama antara lain:

1. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman:

Program Perumahan dan Kawasan Permukiman memiliki sasaran berupa meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah perkotaan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025 – 2029, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan mendapatkan amanat yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun mendatang berupa:

- 4) Menyediakan 879.987 unit rumah melalui pembangunan 14.710 unit rumah susun, 36.840 unit rumah khurus reguler, 337.912 unit rumah tidak layak huni yang ditangani secara swadaya, dan 489.529 unit rumah melalui fasilitasi pembiayaan perumahan;
- 5) Menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas yang melayani 32.582 unit rumah, dengan rincian 22.832 unit rumah tapak dan 9.750 unit hunian vertikal; dan
- 6) Menangani 268 hektar permukiman kumuh di perkotaan secara terpadu.

Untuk tahun 2025 secara spesifik, target output mencakup pemenuhan 1.912 unit rumah susun sewa, peningkatan kualitas 11.697 unit rumah, dan 55 laporan pengaturan, pembinaan, serta pengawasan. Sementara itu, kegiatan pendukung meliputi pemrograman, penganggaran, pemantauan, evaluasi, penyiapan lahan, perizinan, penghunian, akses pembiayaan (seperti koordinasi FLPP, Kredit TAPERA, dan Kredit SMF untuk 81.050 rumah tangga pada 2025), serta pembangunan dan peningkatan kualitas rumah.

2. Program Dukungan Manajemen:

Bertujuan meningkatkan kualitas tata kelola dan pengawasan internal Kementerian PKP, dengan sasaran meningkatnya dukungan manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan hingga mencapai tingkat kualitas 85,15% pada 2025 dan secara bertahap naik hingga 90,01% pada 2029. Indikator mencakup pengelolaan BMN, pembinaan kepegawaian, kinerja anggaran, AKIP, manajemen risiko, dan layanan pendukung seperti kearsipan, hukum, data, organisasi, serta komunikasi publik.

Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan Tahun 2025 menetapkan target 100% untuk Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan (dengan target 1.000.000 unit rumah secara nasional), Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan, dan Persentase Desa yang

memiliki 100% rumah layak huni di Wilayah Perkotaan serta 85,15% untuk Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dengan metode perhitungan berbasis realisasi terhadap target tahunan yang melibatkan data internal dan eksternal. Alokasi anggaran berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2025 pada entitas kerja mencapai total Rp11.174.838.000,00 untuk Program Dukungan Manajemen dan untuk Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp2.868.174.916.000,00 dengan proyeksi peningkatan anggaran tahunan untuk mendukung target output seperti rekomendasi kebijakan, dokumen NSPK, laporan pemantauan, dan pelaksanaan kegiatan fisik.

Secara keseluruhan, Dokumen Renaksi ini dirancang sebagai roadmap untuk mewujudkan pembangunan dan renovasi 1 juta rumah di perkotaan, sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1.1, dengan pendekatan kolaboratif melibatkan pemerintah pusat, daerah, sektor swasta, dan masyarakat. Keberhasilan implementasi bergantung pada optimalisasi koordinasi lintas sektoral, pemanfaatan teknologi untuk pendataan lahan, penguatan skema pembiayaan alternatif seperti KPBU, serta pemantauan ketat melalui indikator kinerja sasaran strategis (IKSS) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Dokumen ini diharapkan menjadi pedoman efektif untuk mengurangi *backlog* perumahan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), generasi milenial, dan generasi Z, serta mendukung transformasi ekonomi nasional melalui sektor perumahan yang berkontribusi pada PDB. Renaksi ini akan menjadi landasan kuat bagi pencapaian visi perumahan dan kawasan permukiman yang efisien, layak, terjangkau.

LAMPIRAN



RENCANA
AKSI
TA 2025

LAMPIRAN

LAMPIRAN I. MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

i. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
			2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN														
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN		%	100	100	100	100	100	100						
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan														
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS														
1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau yang difasilitasi	%	100	100	100	100	100	100	4,195,471,080	29,718,573,275	30,923,906,509	32,779,423,200	34,255,586,738	131,872,960,802
2	Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	%	100	100	100	100	100	100	535,140,000	432,140,000	448,930,000	474,770,000	925,790,000	1,604,070,000
3	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-
SASARAN PROGRAM:									2,373,597,281	12,577,352,898	12,915,943,954	13,774,425,928	14,387,525,328	56,028,845,390
Meningkatnya hunian layak dan terjangkau di wilayah Perkotaan														
2,373,597,28156,634,985,390														
INDIKATOR KINERJA PROGRAM:														
1	Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	%	100	100	100	100	100	100	2,373,597,281	12,720,492,898	13,061,803,954	13,931,845,928	14,547,245,328	56,634,985,390
2	Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	%	100	100	100	100	100	100	-	143,140,000	145,860,000	157,420,000	159,720,000	606,140,000
3	Persentase Desa yang memiliki 100% rumah layak huni di wilayah perkotaan	%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				SATUAN	TARGET				ANGGARAN (Rp Ribu)					
									2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
KEGIATAN 1: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi Perumahan Perkotaan (7661-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)																		
SASARAN KEGIATAN:																		
Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan											6,402,098	17,587,603	18,537,334	19,538,350	20,593,420	82,658,805		
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																		
	1	Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan			%	100	100	100	100	100	100	6,402,098	17,587,603	18,537,334	19,538,350	20,593,420	82,658,805	
	2	Persentase desa yang mendapat intervensi penurunan RTLH di wilayah perkotaan			%	100	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	
	3	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi melalui intervensi tidak langsung di wilayah perkotaan			%	-	100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Pembangunan Perumahan Perkotaan																		
	OUTPUT KEGIATAN:																	
		KRO	7661. ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana														
	1	RO	ABF. 001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomenda si Kebijakan	6	-	-	-	-	6	4,380,148	-	-	-	-	4,380,148	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Pemrograman, Anggaran dan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan																
	2	RO	ABF. 006	Kebijakan, Kemitraan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rekomenda si Kebijakan	-	25	25	25	25	100	-	8,958,865	9,442,644	9,952,546	10,489,984	38,844,039	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi, Pemrograman, Anggaran dan Kemitraan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan															
		KRO	7661. BMA	Data dan Informasi Publik													
	3	RO	BMA. 001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	701,000	1,307,331	1,377,927	1,452,335	1,530,761	6,369,354
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan															
		KRO	7661. FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan													
	4	RO	FAE. 001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Laporan	2	56	56	56	56	226	1,320,950	7,321,407	7,716,763	8,133,468	8,572,675	33,065,264
		Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan															
KEGIATAN 2: Penyelenggaraan Penyiapan lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan (7661-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)																	
SASARAN KEGIATAN:																	
Meningkatnya Akses Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan												7,986,611	8,191,551	8,633,895	9,100,125	9,591,532	43,503,714
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																	
	1	Tingkat fasilitasi lahan, perizinan dan penghunian perumahan perkotaan (keterangan: mencakup komponen pembinaan penyiapan lahan, perizinan, penghunian (50%) dan komponen penyiapan lahan, perizinan, penghunian (50%))			%	100	100	100	100	100	100	7,986,611	8,191,551	8,633,895	9,100,125	9,591,532	43,503,714
PELAKSANA: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan																	

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
							2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	OUTPUT KEGIATAN:																	
		KRO	7661. ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana														
	1	RO	ABF. 002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan	Rekomenda si Kebijakan	4	23	23	23	23	96	2,767,460	3,797,879	4,002,964	4,219,125	4,446,957	19,234,385	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Program, Anggaran, dan Rencana Teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan																
		KRO	7661. BMA	Data dan Informasi Publik														
	2	RO	BMA. 002	Data dan Informasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	-	-	-	-	1	588,040	-	-	-	-	588,040	
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan																
	3	RO	BMA. 005	Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Dokumen	-	1	1	1	1	4	-	425,579	448,560	472,783	498,313	1,845,235	
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian Perumahan Perkotaan																
		KRO	7661. AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
	4	RO	AFA. 001	NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	NSPK	1	1	1	1	1	5	500,000	470,421	495,824	522,598	550,819	2,539,661	
		Jumlah NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan																
		KRO	7661. CBR	Dukungan Teknis														
	5	RO	CBR. 001	Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	-	-	-	-	1	700,000	-	-	-	-	700,000	
		Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan																

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	6	RO	CBR. 003	Dukungan Teknis Penyiapan Lahan dan Perizinan Perumahan Perkotaan	Dokumen	-	2	2	2	2	2	8	-	1,161,053	1,223,750	1,289,832	1,359,483	5,034,119
				Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan														
	7	RO	CBR. 002	Dokumen Dukungan Teknis Perijinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Dokumen	4	-	-	-	-	-	4	2,431,111	-	-	-	-	2,431,111
				Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Perizinan, dan Penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan														
	8	RO	CBR. 004	Dukungan Teknis Penghunian Perumahan Perkotaan	Dokumen	-	3	3	3	3	3	12	-	1,468,150	1,547,430	1,630,991	1,719,065	6,365,636
				Jumlah Dokumen Dukungan Teknis Perizinan, dan Penghunian di bidang pembangunan perumahan perkotaan														
		KRO	7661. FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														
	9	RO	FAE. 002	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Laporan	3	-	-	-	-	-	3	1,000,000	-	-	-	-	1,000,000
				Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian perumahan perkotaan														
	10	RO	FAE. 006	Pemantauan dan Evaluasi Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	Laporan	-	3	3	3	3	3	12	-	868,469	915,366	964,796	1,016,895	3,765,527
				Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyiapan Lahan, Perizinan, dan Penghunian perumahan perkotaan														

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN 3: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan (7661-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)																	
SASARAN KEGIATAN:																	
Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan di Wilayah Perkotaan											8,343,538	8,313,196	8,762,109	9,235,262	9,733,967	44,388,072	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 1:																	
	1	Persentase rumah tangga yang terfasilitasi pembiayaan yang terjangkau di wilayah perkotaan		%		100	100	100	100	100	100	8,343,538	8,313,196	8,762,109	9,235,262	9,733,967	44,388,072
PELAKSANA: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan																	
	OUTPUT KEGIATAN:																
		KRO	7661. ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana													
		RO	ABF. 003	Kebijakan Skema Bantuan Pembiayaan Perumahan, Kerja Sama dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	2	21	21	21	21	86	3,450,000	4,011,849	4,228,489	4,456,827	4,697,496	20,844,661
	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan															
		KRO	7661. AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria													
		RO	AFA. 002	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan	NSPK	3	3	3	3	3	15	1,963,538	1,421,060	1,497,797	1,578,678	1,663,927	8,125,000
	2	Jumlah NSPK Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan															
		KRO	7661. PEA	Koordinasi													

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)							
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		RO	PEA.001	Koordinasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Kegiatan	1	-	-	-	-	1	750,000	-	-	-	-	750,000	
			BA BUN	Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/ Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan Perkotaan 408.475 selama 5 tahun	Keluarga	81,050	-	-	-	-	81,050	9,703,000,000	-	-	-	-	9,703,000,000	
	3	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitas Penyaluran Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan Perkotaan																
		RO	PEA.002	Koordinasi dan Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Kegiatan	-	1	1	1	1	4	-	400,000	421,600	444,366	468,362	1,734,329	
			BA BUN	Jumlah Rumah Tangga yang Menerima Fasilitas Pembiayaan Perumahan/ Bantuan Subsidi/ Kemudahan Perumahan Perkotaan 408.475 selama 5 tahun	Keluarga	-	95,800	103,200	104,650	104,825	408,475	-	12,939,000,000	13,807,000,000	14,010,000,000	14,300,000,000	55,056,000,000	
	4	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi dan Fasilitas Penyaluran Bantuan/Kemudahan Pembiayaan Perumahan Perkotaan																
		KRO	7661.AEE	Kemitraan														
		RO	AEE.001	Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan	Kesepakatan	1	-	-	-	-	1	500,000	-	-	-	-	500,000	
	5	Jumlah Kesepakatan Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan																
		RO	AEE.002	Kegiatan Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan	Kesepakatan	-	1	1	1	1	4	-	977,028	1,029,788	1,085,396	1,144,007	4,236,219	
	6	Jumlah Kesepakatan Kegiatan Pembiayaan Kreatif dan Kemitraan Perumahan Perkotaan yang Dilaksanakan																
		KRO	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
							2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		RO	FAE. 003	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Laporan	3	3	3	3	3	15	1,680,000	1,215,857	1,281,513	1,350,715	1,423,654	6,951,739	
	7	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembiayaan Perumahan Perkotaan																
		KRO	7661. AEF	Sosialisasi dan Diseminasi														
		RO	AEF. 001	Sosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan	Orang	-	100	100	100	100	400	-	287,402	302,922	319,279	336,521	1,246,124	
	8	Jumlah Orang yang Tersosialisasi Fasilitas Pembiayaan Perumahan Perkotaan																
KEGIATAN 4: Penyediaan Rumah yang Layak Huni di Perkotaan (7661-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)																		
Unit Kerja Pelaksana IKK Penyediaan rumah layak huni baru dan PIC IKK hunian vertikal																		
SASARAN KEGIATAN 1:																		
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan												2,141,842,961	10,407,099,906	10,636,145,301	11,385,620,147	11,889,226,035	46,459,934,350	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:												2,141,842,961	10,407,099,906	10,636,145,301	11,385,620,147	11,889,226,035	46,459,934,350	
	1	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan perumahan perkotaan			%	100	100	100	100	100	100	22,842,961	10,099,906	10,645,301	11,220,147	11,826,035	66,634,350	
	2	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni baru di wilayah perkotaan			%	100	100	100	100	100	100	-	4,144,000,000	4,088,000,000	4,282,000,000	4,476,000,000	16,990,000,000	
	3	Persentase penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu di wilayah perkotaan			%	100	100	100	100	100	100	2,119,000,000	6,170,000,000	6,416,000,000	6,965,000,000	7,267,000,000	28,937,000,000	
	4	Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana, dan utilitas umum di perkotaan			%	100	100	100	100	100	100	-	83,000,000	87,000,000	91,000,000	96,000,000	357,000,000	

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
							2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	5	Persentase rumah yang mendapat prasarana, sarana dan utilitas umum hunian vertikal		%	100	100	100	100	100	100	-	-	34,500,000	36,400,000	38,400,000	109,300,000		
PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan																		
	OUTPUT KEGIATAN:																	
		KRO	7661. ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana														
	1	RO	ABF. 004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomenda si Kebijakan	5	24	24	24	24	101	9,845,269	5,184,593	5,464,561	5,759,647	6,070,668	32,324,739	
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan pembangunan Perumahan Perkotaan																
		KRO	7661. AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria														
	2	RO	AFA. 003	NSPK Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	NSPK	1	1	1	1	1	5	355,692	257,423	271,324	285,975	301,418	1,471,832	
		Jumlah NSPK penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan																
		KRO	7661. BMA	Data dan Informasi Publik														
	3	RO	BMA. 003	Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan	Dokumen	1	1	1	1	1	5	150,000	507,331	534,727	563,602	594,037	2,349,697	
		Jumlah Dokumen Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan																
		KRO	7661. FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														
	4	RO	FAE. 004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Laporan	7	10	10	10	10	47	12,492,000	4,150,559	4,374,689	4,610,922	4,859,912	30,488,083	
		Jumlah laporan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan																
		KRO	7661. CDB	OP Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman														
	5	RO	CDB. 001	Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jumlah Pemeliharaan dan Perawatan Tower Rumah Susun Perkotaan															
		KRO	7661. CBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman													-
	6	RO	CBB. 001	Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Tinggi Perkotaan															
	7	RO	CBB. 002	Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan	Unit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Keagamaan Perkotaan															
	8	RO	CBB. 003	Rumah Susun Asrama Pendidikan Perkotaan	Unit	-	199	-	-	-	199		280,701,242				280,701,242
		Jumlah Rumah Susun Asrama Pendidikan Perkotaan															
		KRO	7661. RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman													
	9	RO	RBB. 001	PSU Perumahan Tapak Perkotaan	Unit	-	5,708	5,708	5,708	5,708	22,832		83,000,000	87,000,000	91,000,000	96,000,000	357,000,000
		Jumlah rumah tapak yang mendapatkan bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) di perkotaan															
	10	RO	RBB. 002	Rumah Khusus Perumahan Perkotaan	Unit	-	9,210	9,210	9,210	9,210	36,840		4,144,000,000	4,088,000,000	4,282,000,000	4,476,000,000	16,990,000,000
		Jumlah Rumah Khusus Perumahan Perkotaan															
	11	RO	RBB. 003	Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan	Unit	100	156	-	-	-	256	1,325,683,289	92,515,738				1,418,199,027
		Jumlah Rumah Susun Hunian ASN/TNI/POLRI Perumahan Perkotaan															
	12	RO	RBB. 004	Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan	Unit	-	65	-	-	-	65	25,020,571	82,174,145				107,194,716

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR				SATUAN		TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
										2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)					(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		Jumlah Rumah Susun Hunian MBR/Pekerja Perumahan Perkotaan																			
	13	RO	RBB. 005	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan	Hektar	-	69	68	68	69	274	-	145,000,000	150,000,000	157,000,000	166,000,000				618,000,000	
		Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perkotaan																			
	14	RO	RBB. 006	Rumah Susun Hunian Perkotaan	Unit	-	2,789	3,380	3,510	3,510	13,189		5,666,710,057	6,416,000,000	6,965,000,000	7,267,000,000				26,314,710,057	
		Jumlah Rumah Susun Hunian di Wilayah Pekotaan																			
	15	RO	RBB. 007	Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan	Unit	960	240	-	-	-	1,200	768,296,140	47,898,818							816,194,958	
		Jumlah Rumah Susun ASN dan HANKAM (IKN) Perumahan Perkotaan																			
	16	RO	RBB. 009	PSU Rumah Susun Perkotaan	Unit	-	-	3,250	3,250	3,250	9,750			34,500,000	36,400,000	38,400,000				109,300,000	
		Jumlah Unit yang mendapat bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Vertikal di Perkotaan																			
Unit Kerja Kontributor KP Luasan hektar permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu																					
SASARAN KEGIATAN 2:																					
Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di wilayah perkotaan																					
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																					
	1	Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu di perkotaan			%	100	100	100	100	100	100	-	143,140,000	145,860,000	157,420,000	159,720,000				606,140,000	
PELAKSANA: Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan																					
	OUTPUT KEGIATAN:																				

PROGRAM/ KEGIATAN					SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET				ANGGARAN (Rp Ribu)						
								2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029
(1)				(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		KRO	7661. RBB	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana														
	1	RO	RBB. 005	Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan		Hektar	-	68	66	68	66	268	-	143,140,000	145,860,000	157,420,000	159,720,000	606,140,000
		Luas Permukiman Kumuh yang Ditangani Secara Terpadu di Wilayah Perkotaan																
	2	RO	RBB. 011	Rumah Bersantiasi Layak di Wilayah Perkotaan		Unit	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	0
		Jumlah Rumah Bersantiasi Layak di Wilayah Perkotaan																
KEGIATAN 5: Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan (7661-Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan)																		
Unit Kerja Pelaksana KP Jumlah unit rumah yang ditingkatkan kualitasnya																		
SASARAN KEGIATAN 1:																		
Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan												209,022,073	2,136,160,642	2,243,865,317	2,350,932,044	2,458,380,374	9,398,360,450	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																		
	1	Persentase penyelenggaraan kebijakan, data dan informasi serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan				%	100	100	100	100	100	100	25,022,073	124,160,642	130,865,317	137,932,044	145,380,374	563,360,450
	2	Persentase penyediaan unit rumah layak huni melalui peningkatan kualitas pembangunan perumahan perkotaan				%	100	100	100	100	100	100	184,000,000	2,012,000,000	2,113,000,000	2,213,000,000	2,313,000,000	8,835,000,000
PELAKSANA: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan																		
	OUTPUT KEGIATAN:																	
		KRO	7661. ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana														

PROGRAM/ KEGIATAN				SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)							
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		RO	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	6	24	24	24	24	102	7,905,000	39,142,618	41,256,319	43,484,161	45,832,305	44,030,501	
				Jumlah Rekomendasi Kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan														
		KRO	7661.BMA	Data dan Informasi Publik														
		RO	BMA.004	Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Dokumen	7	7	7	7	7	35	2,912,073	5,507,331	5,804,727	6,118,182	6,448,564	16,220,118	
				Jumlah Dokumen Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan														
		KRO	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan														
		RO	FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan	Laporan	5	4	4	4	4	21	14,205,000	79,510,693	83,804,270	88,329,701	93,099,505	358,949,169	
				Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan														
		KRO	7661.RBB	Prasarana Bidang Perumahan dan Pemukiman														
		RO	RBB.008	Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit	5,412	83,125	83,125	83,125	83,125	337,912	184,000,000	2,012,000,000	2,113,000,000	2,213,000,000	2,313,000,000	8,835,000,000	
				Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Peningkatan Kualitas di Perkotaan														
SASARAN KEGIATAN 2:																		
Terbangunnya Rumah Layak Huni di Perkotaan												0	0	0	0	0	0	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN:																		
	1	Persentase Peningkatan Ketersediaan Rumah Layak Huni Baru di Wilayah Perkotaan			%	100	100	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	
PELAKSANA: Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan																		

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	OUTPUT KEGIATAN:																
		KRO	7661. RBB	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana													
		RO	RBB. 010	Stimulan Pembangunan Rumah Swadaya di Perkotaan	Unit												
				Jumlah Rumah Layak Huni yang Tersedia Melalui Pembangunan Baru di Perkotaan													

ii. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)								
					2025	2026	2027	2028	2029	TOT AL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL		
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
UNIT ORGANISASI: DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN																		
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN					-	-	-	-	-	-							-	
INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS 1:																		
	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP			%	84,9	86,7	88,5	90,3	91,8	91,8	619.430.323	1.749.735.389	1.850.472.284	1.958.230.161	2.082.720.690	9.365.386.848		
SASARAN PROGRAM :																		
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan																		
INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM:				%														
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					85,15	86,26	87,50	88,85	90,01	90,01	11.174.838	31.801.491	38.918.772	41.020.385	43.235.486	166.150.972		
	1	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan		%	73,10	74,10	75,10	76,10	77,10	77,10								
	2	Tingkat Efektivitas Pengelolaan BMN		%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83								
	3	Tingkat layanan pembentukan produk hukum		%	80,40	82,10	83,40	86,40	87,20	87,20								

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)							
					2025	2026	2027	2028	2029	TOT AL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	4	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian organisasi tata laksana		%	70,00	75,00	80,00	85,00	90,00	90,00							
	5	Nilai Kinerja Anggaran		%	88,20	88,50	90,00	91,40	92,90	92,90							
	6	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		%	100	100	100	100	100	100							
	7	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Organisasi		%	92,20	92,30	92,40	92,50	92,60	92,60							
	8	Tingkat Layanan Komunikasi Publik		%	85,50	86,25	87,00	87,75	88,50	88,50							
	9	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		%	100	100	100	100	100	100							
	10	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP		%	92	92	92	92	92	92							
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																	
SASARAN KEGIATAN :																	
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :				%													
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan					87,15	87,80	88,62	89,54	90,29	90,29	6.578.783	23.194.933	29.847.459	31.459.222	33.158.020	124.238.418	
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN		%	70,07	72,38	75,03	77,35	79,83	79,83							
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian		%	100	100	100	100	100	100							
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja		%	88,2	88,5	90	91,4	92,9	92,9							
	4	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi atas Temuan LHP BPK RI		%	100	100	100	100	100	100							
	5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja		%	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6							
	6	Tingkat Layanan Komunikasi Publik			85,5	86,25	87	87,75	88,5	88,5							
	7	Tingkat Kualitas Pengelolaan Kearsipan			73,1	74,1	75,1	76,1	77,1	77,1							
	8	Tingkat layanan pembentukan produk hukum			80,4	82,1	83,4	86,4	87,2	87,2							

PROGRAM/KEGIATAN				SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
					2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
9	Tingkat kualitas laporan penyelenggaraan SPIP		92	92	92	92	92	92	92							
10	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi		100	100	100	100	100	100	100							
PELAKSANA: Sekretariat Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan																
OUTPUT KEGIATAN:																
	KR O	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
	RO	EBA. 956 -	Layanan BMN	Layanan	1	20	20	20	20	81	357.000	2.840.928	2.994.338	3.156.032	3.326.458	12.674.757
			Jumlah Layanan BMN													
	RO	EBA. 957 -	Layanan Hukum	Layanan	3	3	3	3	3	15	1.238.512	1.695.551	1.787.111	1.883.615	1.985.330	8.590.118
			Jumlah Layanan Hukum													
	RO	EBA. 963 -	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	20	20	20	20	81	450.000	2.863.250	3.017.866	3.180.830	3.352.595	12.864.541
			Jumlah Layanan Data dan Informasi													
	RO	EBA. 960 -	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Layanan	3	3	3	3	3	15	1.059.400	1.441.658	1.519.508	1.601.561	1.688.045	7.310.172
			Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal													
	RO	EBA. 962 -	Layanan Umum	Layanan	1	55	55	55	55	221	333.000	5.071.497	5.345.358	5.634.007	5.938.244	22.322.106
			Jumlah Layanan Umum													
	RO	EBA. 994 -	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	1.438.126	2.068.699	2.180.409	2.298.151	2.422.251	10.407.636
			Jumlah Layanan Perkantoran													
	KR O	EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal													
	RO	EBB. 951 -	Layanan Sarana Internal	Unit	68	68	68	68	68	340	755.745	3.675.000	3.873.450	4.082.616	4.303.078	16.689.889
			Jumlah Layanan Sarana Internal													

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOT AL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		KR O	EBC	Layanan Manajemen SDM Internal													
		RO	EBC. 954 -	Layanan Manajemen SDM	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	819.000	863.226	909.840	958.972	3.551.038
				Jumlah Layanan Manajemen SDM													
		RO	EBC. 996 -	Layanan Pendidikan dan Pelatihan	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	1.207.500	1.272.705	1.341.431	1.413.868	5.235.504
				Jumlah Layanan Pendidikan dan Pelatihan													
		KR O	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													
		RO	EBD. 952 -	Layanan Perencanaan dan Penggangan	Layanan	1	1	1	1	1	5	150.000	225.000	237.150	249.956	263.454	1.125.560
				Jumlah Layanan Perencanaan dan Penggangan													
		RO	EBD. 953 -	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	120.000	126.480	133.310	140.509	520.299
				Jumlah Layanan Pemantauan dan Evaluasi													
		RO	EBD. 955 -	Layanan Manajemen Keuangan	Layanan	2	2	2	2	2	10	797.000	836.850	882.040	929.670	979.872	4.425.432
				Jumlah Layanan Manajemen Keuangan													
		RO	EBD. 961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	55	55	55	166	-	260.000	5.674.040	5.980.438	6.303.382	18.217.860
				Jumlah Layanan Reformasi Kinerja													
		RO	EBD. 974 -	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	70.000	73.780	77.764	81.963	303.508
				Jumlah Layanan Penyelenggaraan Kearsipan													

PROGRAM/ KEGIATAN		SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR			SATUAN	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOT AL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)			(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																	
SASARAN KEGIATAN :																	
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :					%												
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan						88,32	88,98	89,64	90,30	90,97	90,97	1.007.521	1.840.263	1.939.637	2.044.378	2.154.774	8.986.573
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%	100	100	100	100	100	100						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%	87	87,5	88	88,5	89	89						
	4	Tingkat Layanan Manajemen Data Unit Organisasi				100	100	100	100	100	100						
	5	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6						
	6	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%	91	91,1	91,2	91,3	91,4	91,4						
	7	Tingkat kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran			%	75	78	81	84	87	87						
PELAKSANA: Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
		KR O	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
		RO	EBA. 962 -	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	110.500	375.000	395.250	416.594	439.090	1.736.433
				Jumlah Layanan Umum													
		RO	EBA. 994 -	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	897.021	1.365.263	1.438.987	1.516.693	1.598.594	6.816.558
				Jumlah Layanan Perkantoran													
		KR O	EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal													

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOT AL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		RO	EBD. 961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.582
				Jumlah Layanan Reformasi Kinerja													
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERUMAHAN PERKOTAAN																	
SASARAN KEGIATAN :																	
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :					%												
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan						88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	885.200	1.685.144	1.776.142	1.872.053	1.973.144	8.191.684
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%	100	100	100	100	100	100						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%	87	88	88	89	89	89						
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%	92,2	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6						
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%	91	91,1	91,2	91,3	91,4	91,4						
PELAKSANA: Direktorat Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
		KR O	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
		RO	EBA. 962 -	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	107.500	375.000	395.250	416.594	439.090	1.733.433
				Jumlah Layanan Umum													
		RO	EBA. 994 -	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	777.700	1.210.144	1.275.492	1.344.368	1.416.964	6.024.668
				Jumlah Layanan Perkantoran													

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOT AL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		RO	EBD. 961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.582
				Jumlah Layanan Reformasi Kinerja													
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PERUMAHAN PERKOTAAN				MANAJEMEN PERUMAHAN													
7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PERUMAHAN PERKOTAAN				MANAJEMEN PERUMAHAN													
SASARAN KEGIATAN :																	
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																	
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan					%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	877.521	1.671.911	1.762.194	1.857.353	1.957.650	8.126.629
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%	87	87,5	88	88,5	89	89						
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%	92	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6						
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%	91	91,1	91,2	91,3	91,4	91,4						
PELAKSANA: Direktorat Pembiayaan Perumahan Perkotaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
		KRO	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
		RO	EBA. 962 -	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	110.000	375.000	395.250	416.594	439.090	1.735.933
				Jumlah Layanan Umum													
		RO	EBA. 994 -	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	767.521	1.196.911	1.261.544	1.329.668	1.401.470	5.957.113
				Jumlah Layanan Perkantoran													

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOT AL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		RO	EBD. 961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.582
				Jumlah Layanan Reformasi Kinerja													
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERKOTAAN				MANAJEMEN PERUMAHAN													
7676-DUKUNGAN MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERKOTAAN				MANAJEMEN PERUMAHAN													
SASARAN KEGIATAN :																	
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																	
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Pembangunan Perumahan Perkotaan					%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	919.150	1.711.144	1.803.546	1.900.937	2.003.588	8.338.365
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%	100	100	100	100	100	100						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%	87	87,5	88	88,5	89	89						
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%	92	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6						
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%	91	91,1	91,2	91,3	91,4	91,4						
PELAKSANA: Pembangunan Perumahan Perkotaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
		KR O	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
		RO	EBA. 962 -	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	121.450	375.000	395.250	416.594	439.090	1.747.383
				Jumlah Layanan Umum													
		RO	EBA. 994 -	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	797.700	1.236.144	1.302.896	1.373.252	1.447.408	6.157.400
				Jumlah Layanan Perkantoran													

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOT AL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		RO	EBD. 961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.582
				Jumlah Layanan Reformasi Kinerja													
KEGIATAN: 7676-DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PERKOTAAN			MANAJEMEN PERUMAHAN														
7676-DUKUNGAN PENYELENGGARAAN PERKOTAAN			MANAJEMEN PERUMAHAN														
SASARAN KEGIATAN :																	
Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan																	
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN :																	
Tingkat Layanan Dukungan Manajemen Direktorat Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan					%	88,88	89,35	89,82	90,29	90,76	90,76	906.663	1.698.096	1.789.793	1.886.442	1.988.310	8.269.304
	1	Tingkat efektivitas pengelolaan BMN			%	74,18	75,83	77,48	79,13	80,78	80,78						
	2	Tingkat layanan pembinaan dan pengelolaan kepegawaian			%	100	100	100	100	100	100						
	3	Nilai kinerja anggaran Unit Kerja			%	87	87,5	88	88,5	89	89						
	4	Tingkat Penyelenggaraan AKIP Unit Kerja			%	92	92,3	92,4	92,5	92,6	92,6						
	5	Tingkat Efektivitas Penerapan Manajemen Risiko			%	91	91,1	91,2	91,3	91,4	91,4						
PELAKSANA: Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
		KR O	EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal													
		RO	EBA. 962 -	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	1	1	5	119.000	375.000	395.250	416.594	439.090	1.744.933
				Jumlah Layanan Umum													

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN STRATEGIS (IMPACT)/SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR		SATUAN	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
						2025	2026	2027	2028	2029	TOT AL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
		RO	EBA. 994 -	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	1	1	5	787.663	1.223.096	1.289.143	1.358.757	1.432.130	6.090.789
				Jumlah Layanan Perkantoran													
		RO	EBD. 961 -	Layanan Reformasi Kinerja	Layanan	-	1	1	1	1	4	-	100.000	105.400	111.092	117.091	433.582
				Jumlah Layanan Reformasi Kinerja													

LAMPIRAN II. SURAT PENGESAHAN DIPA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : SP DIPA- 146.05.1.694311/2025



DS 5513-3066-6449-0898

Revisi ke 09

Tanggal : 25 Agustus 2025

A. Dasar Hukum:

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (146) | KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN |
| 2. Unit Organisasi | : (05) | DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN |
| 3. Provinsi | : (01) | DKI JAKARTA |
| 4. Kode/Nama Satker | : (694311) | DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN |
| Sebesar | : Rp. 337.109.206.000 | (TIGA RATUS TIGA PULUH TUJUH MILIAR SERATUS SEMBILAN JUTA DUA RATUS ENAM RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Terlampir

Terlampir

Jumlah Uang

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	337.109.206.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|-----------------|
| 1. KPPN JAKARTA V | (139) Rp. | 337.109.206.000 |
|-------------------|-----------|-----------------|

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.
LUKY ALFIRMAN
NIP. 197003271995031002

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.694311/2025



Satker : (694311) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	Rp.	337.109.206.000
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	Rp.	325.934.368.000
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	Rp.	11.174.838.000

LAMPIRAN
SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.694311/2025



DS 5513-3066-6449-0896

Satker : (694311) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp.	325.934.368.000
IA.7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	325.934.368.000
WA	Program Dukungan Manajemen	Rp.	11.174.838.000
WA.7676	Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp.	11.174.838.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.694311/2025
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
 Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
 Provinsi : (01) DKI JAKARTA
 Kode>Nama Satker : (694311) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Halaman : I A. 1

Program	:	146.05.IA	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman			325.934.368.000	
Kegiatan	:	7661	Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan			325.934.368.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:						
Klasifikasi Rincian Output	1	:	7661.ABF	Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana	26,00	Rekomendasi Kebijakan	10.843.357.000
Rincian Output	:	01	ABF.001	Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	6,00	Rekomendasi Kebijakan	3.387.020.000
	:	02	ABF.002	Kebijakan Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunan Perumahan Perkotaan	5,00	Rekomendasi Kebijakan	1.956.523.000
	:	03	ABF.003	Kebijakan Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	3,00	Rekomendasi Kebijakan	1.186.326.000
	:	04	ABF.004	Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	6,00	Rekomendasi Kebijakan	2.863.183.000
	:	05	ABF.005	Kebijakan Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	6,00	Rekomendasi Kebijakan	1.451.325.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	7661.AEE	Kemitraan	1,00	Kesepakatan	415.000.000
Rincian Output	:	01	AEE.001	Kegiatan KPBU dan Pembiayaan Kreatif Perumahan Perkotaan yang Siap Dikerjasamakan	1,00	Kesepakatan	415.000.000
Klasifikasi Rincian Output	3	:	7661.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	5,00	NSPK	1.744.968.000
Rincian Output	:	01	AFA.001	NSPK Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunan Perumahan Perkotaan	1,00	NSPK	388.212.000
	:	02	AFA.002	NSPK Pengembangan Skema Pembiayaan Perumahan Perkotaan	3,00	NSPK	1.098.538.000
	:	03	AFA.003	NSPK Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1,00	NSPK	258.218.000
Klasifikasi Rincian Output	4	:	7661.BMA	Data dan Informasi Publik	10,00	dokumen, Peta, Data	3.545.922.000
Rincian Output	:	01	BMA.001	Data dan Informasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	1,00	dokumen	838.484.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 146.05.1.694311/2025
I A. INFORMASI KINERJA



Kementerian Negara/Lembaga : (146) KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Unit Organisasi : (05) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (694311) DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

Halaman : I A. 2

Data dan Informasi Publik				dokumen, Peta, Data		
	02	BMA.002	Data dan Informasi Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1,00	dokumen	573.640.000
	03	BMA.003	Data dan Informasi Pembangunan Perumahan Perkotaan	1,00	dokumen	236.725.000
	04	BMA.004	Data dan Informasi Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	7,00	dokumen	1.897.073.000
Klasifikasi Rincian Output	5	7661.CBR	Dukungan Teknis	5,00	Dokumen	1.897.143.000
Rincian Output	01	CBR.001	Dokumen Dukungan Teknis Penyiapan Lahan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1,00	Dokumen	629.000.000
	02	CBR.002	Dokumen Dukungan Teknis Perijinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	4,00	Dokumen	1.068.143.000
Klasifikasi Rincian Output	6	7661.FAE	Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan	20,00	Laporan, Layanan	9.477.666.000
Rincian Output	01	FAE.001	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	2,00	Laporan	1.928.572.000
	02	FAE.002	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyiapan Lahan, Perizinan dan Penghunian Perumahan Perkotaan	3,00	Laporan	928.656.000
	03	FAE.003	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan Perkotaan	4,00	Laporan	1.331.938.000
	04	FAE.004	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	7,00	Laporan	3.138.500.000
	05	FAE.005	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	4,00	Laporan	2.150.000.000
Klasifikasi Rincian Output	7	7661.PEA	Koordinasi	1,00	kegiatan	645.030.000
Rincian Output	01	PEA.001	Koordinasi Pembiayaan Perumahan Perkotaan	1,00	kegiatan	645.030.000

LAMPIRAN III. LEMBAR PERJANJIAN KINERJA


**KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN**
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sri Haryati**
Jabatan : Direktur Jenderal Perumahan Perkotaan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Didyk Choiroel**
Jabatan : a.n. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Sekretaris Jenderal (*berdasarkan Keputusan Menteri PKP Nomor 123/KPTS/M/2025 tentang Pendelegasian Kewenangan Tugas dan Fungsi Tertentu*)

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membuat Perjanjian Kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.
2. Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

DIDYK CHOIROEL

Jakarta, 26 Agustus 2025

Pihak Pertama

SRI HARYATI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1	Meningkatkan Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	1 Persentase Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	100%
		2 Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh di Wilayah Perkotaan	-
		3 Persentase Desa yang Memiliki 100% Rumah Layak Huni di Wilayah Perkotaan	100%
2	Meningkatkan Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1 Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	85,15 %

PROGRAM

- 1 Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 2 Dukungan Manajemen

PAGU APBN

Rp 2.768.159.169.000,00
 Rp 11.174.838.000,00
Rp 2.779.334.007.000,00

Jakarta, 26 Agustus 2025

a.n. MENTERI
 PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
 SEKRETARIS JENDERAL

DIREKTUR JENDERAL PERUMAHAN PERKOTAAN

DIDYK CHOIROEL

SRI HARYATI